

Kuasa

Taipan

**Kelapa Sawit
di Indonesia**



Daftar Isi:

1. Pengantar	1
2. Dampak Negatif Kelapa Sawit	2
3. Mengapa Kajian Taipan	5
4. Metodologi	6
5. Pemilihan Grup Bisnis Kelapa Sawit Milik Taipan	8
6. Para Taipan Dibalik Grup Bisnis Sawit	10
7. Kendali Taipan atas <i>Landbank</i> Kelapa Sawit	15
8. Kontrol Taipan atas Masa Depan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia	17
9. Kontrol Taipan atas <i>Landbank</i> Kelapa Sawit Per Provinsi	19
10. Pembiayaan Ekspansi Sawit Milik Para Taipan	23
11. Bank-bank yang Membiayai Grup Bisnis Para Taipan	25
12. Konsekuensi Kebijakan	29
Tentang TuK INDONESIA	35

1. Pengantar

Transformasi untuk Keadilan Indonesia - TuK INDONESIA masih sangat muda dalam eksistensinya. TuK INDONESIA mendorong terwujudnya hak konstitusional rakyat menuju keadilan, kesejahteraan dan jatidiri bangsa Indonesia. Visi ini bermakna sebuah tindakan kolektif – sebagaimana watak gerakan sosial – dan karena itu memosisikan TuK INDONESIA sebagai sebuah mata rantai dalam gerakan sosial di Indonesia, yang berpedoman pada realitas sosial masyarakat Indonesia yang beragam, baik asal usul, dinamika sosial, maupun orientasi perkembangannya masing-masing, yang diikat dalam sebuah visi kebangsaan. Implikasi dari nilai dasar dan visi TuK INDONESIA yang demikian itu mau tak mau harus menjangkau ruang-ruang struktural negara, sektor bisnis, maupun dinamika sosial masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, ruang struktural negara maupun sektor bisnis dibangun, dikembangkan, dan dikontrol melalui sistem peraturan dan kebijakan-kebijakan, sedangkan dinamika sosial masyarakat ditentukan oleh norma-norma yang dikembangkan oleh masyarakat bersangkutan.

Berangkat dari visi tersebut, sejak awal TuK INDONESIA telah terlibat secara langsung dalam advokasi kasus terkait konflik lahan maupun kemitraan, terutama di sektor kelapa sawit. Selain itu, pengalaman personal para anggota TuK INDONESIA dan keterlibatan dalam penanganan kasus membawa kebutuhan untuk memahami siapa sebenarnya person di ‘ujung sana’ dari suatu kasus. Dari sini, kami menyimpulkan pentingnya melakukan kajian taipan, utamanya dari 25 grup perusahaan kelapa sawit terbesar yang beroperasi di Indonesia.

Secara faktual, pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang serius: sejumlah besar hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi diubah menjadi perkebunan; habitat spesies yang dilindungi terancam punah; emisi gas rumah kaca meningkat secara signifikan karena pembangunan lahan gambut; dan banyaknya masyarakat yang kehilangan akses terhadap tanah yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka saat mereka memiliki hak adat atas tanah tersebut selama beberapa generasi.

2. Dampak Negatif Kelapa Sawit

Dampak negatif perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentanan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.

Dampak ekologi pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan proses konversi atau alih fungsi dan bentuk lahan yang merubah bentang alam lahan yang luas sehingga menyebabkan kerusakan fungsi dan jasa lingkungan.

Dampak ekonomi perubahan bentang alam terutama hutan, lahan, badan air, danau dan sungai menutup, membatasi dan mengurangi kemampuan dan akses masyarakat adat, perdesaan dan petani dalam meneruskan dan memelihara anugerah alam yang selama ini menjadi alat dan faktor yang menjadi sumber mata pencaharian, pangan dan papan mereka.

Dampak sosial perubahan bentang alam juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi dan kehidupan sosial masyarakat akibat penguasaan dan persaingan yang semakin mengurangi dan merubah secara paksa jati-diri, kebiasaan dan kearifan masyarakat seperti berkurang atau tertutupnya hak dan akses, mata pencaharian, nilai budaya dan agama, mobilisasi tenaga kerja dari luar dengan hadirnya perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Dampak budaya bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya mengalami perubahan, degradasi dan bahkan kepunahan kearifan lokal, tradisi, seni, nilai dan praktek kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada hutan, sungai, danau dan betang alam lainnya.

Konflik lahan dan sumber daya agraria penguasaan dan kepemilikan skala besar oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan ketimpangan, ketidakadilan dan hilangnya hak, akses, kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi sumber-sumber agraria yang ada dalam masyarakat sehingga terjadi benturan dan sengketa yang mengorbankan harta benda dan bahkan nyawa. Merujuk pada referensi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sepanjang 2013, terjadi 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 Ha dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Jika diurutkan, sektor tersebut meliputi sektor perkebunan (180 konflik/48,78%), infrastruktur (105 konflik/28,46%), pertambangan (38 konflik/10,3%), kehutanan (31 konflik/8,4%), pesisir/kelautan (9 konflik/2,44%) dan lain-lain (6 konflik/1,63%).¹ Dengan kata lain, hampir setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agraria di tanah air yang melibatkan 383 KK (1532 Jiwa) dengan luas wilayah konflik sekurang-kurangnya 3.512 Ha.

Pemanasan global dari kelapa sawit sangat erat dengan sumber-sumber emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan rantai pasok minyak sawit yang mengakibatkan rusaknya fungsi dan kemampuan serapan gas rumah kaca oleh lahan, hutan, dan gambut, termasuk gas-gas yang dihasilkan dari pabrik minyak sawit dan residu gas dari pupuk pertanian bahan kimia dan bahan bakar fosil aktifitas mesin pabrik dan perkebunan kelapa sawit.

Kerentanan pangan terutama masyarakat adat dan perdesaan berkurang baik mutu dan jumlahnya dengan semakin terbatasnya lahan pertanian dan sumber agraria akibat himpitan dan tekanan perluasan dan penguasaan oleh perkebunan kelapa sawit.

¹ Pada tahun 2012, KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK), 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka akibat penganiayaan, 25 diantaranya luka karena tertembak, dan 3 orang tewas dalam konflik agraria.

Pencemaran air, udara dan tanah bersumber dari aktifitas pembukaan lahan perkebunan seperti erosi dan sedimentasi, pembakaran lahan dan hutan, penggunaan bahan kimia pertanian yang bersumber dari pestisida dan herbisida berbahaya, beracun dan sangat mematikan oleh kebun sawit dan gas-gas pencemar lainnya dalam proses dan aktifitas pabrik terpapar dan menguap dalam air, tanah dan udara sekitarnya.

Dampak-dampak tidak langsung lainnya adalah berbagai dampak dari buruknya tata kelola, sistem dan pranata hukum, dan lemahnya keinginan politik, komitmen kelembagaan dan kapasitas pemerintah dalam penegakkan hukum dalam mengendalikan dampak perkebunan dan industri kelapa sawit termasuk menjamurnya korupsi, kolusi dan nepotisme, kabut asap, eksploitasi buruh, pekerja anak, perdagangan manusia, penghindaran pajak, ketidak-adilan gender, pelanggaran hak buruh, hak asasi manusia, dll.

3. Mengapa Kajian Taipan

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, kami berkesimpulan, kekuatan pendorong di balik pertumbuhan yang kuat dari sektor minyak kelapa sawit, yaitu pemilik dan penyandang dana – harus memikul tanggung jawab atas dampak-dampak tersebut. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa kepemilikan perkebunan kelapa sawit lebih terkonsentrasi daripada yang terlihat pada pandangan pertama, karena banyak perusahaan perkebunan dimiliki grup usaha besar. Grup usaha dalam jumlah yang terbatas ini menyumbang sebagian besar perkebunan yang ada dan mengembangkan *landbank* dalam skala yang sangat luas menjadi perkebunan baru.

Sebagian besar grup usaha ini telah dikendalikan oleh taipan (*tycoon* dalam bahasa Inggris)–atau taipan dalam bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata dalam bahasa Jepang Taikun (大君), yang secara harfiah berarti “Tuan Besar”. Istilah ini sekarang sudah umum digunakan untuk merujuk kepada taipan (taipan) bisnis kaya yang-sering bersama-sama dengan keluarga mereka menjadi pengendali perusahaan yang aktif dalam berbagai sektor usaha, seperti perkebunan, pertambangan, energi, real estat, keuangan dan jasa.

Kajian ini membahas secara khusus:

- Bagian mana dari sektor minyak sawit Indonesia didominasi oleh kelompok usaha yang dikendalikan oleh taipan;
- Siapa saja taipan yang mengendalikan grup-grup bisnis ini; dan
- Bank dan lembaga keuangan apa saja yang mendukung taipan membangun perusahaan kelapa sawit mereka.

4. Metodologi

4.1 Seleksi grup kelapa sawit yang dikendalikan taipan

Untuk kajian ini dilakukan seleksi sebanyak 25 grup usaha yang dikuasai taipan yang aktif di sektor kelapa sawit Indonesia. Berdasarkan informasi yang ada, terpilih 25 grup yang dikendalikan taipan terbesar.

Untuk memilih 25 grup perusahaan terbesar yang dikendalikan para taipan, dihimpun suatu gambaran menggunakan data Bloomberg atas daftar perusahaan kelapa sawit terbesar berdasarkan pendapatan dan kapitalisasi pasar. Laporan tahunan perusahaan-perusahaan ini dikaji untuk menghimpun data tentang *landbank* mereka di Indonesia. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang dikuasai negara (Perkebunan Nusantara, Sime Darby, Felda Global Ventures dan PTT) tidak termasuk dalam daftar ini; karena definisi taipan yang mengecualikannya.

Selain itu, situs web dari grup kelapa sawit dan laporan media dijadikan rujukan untuk mengumpulkan data tentang grup kelapa sawit yang tidak terdaftar tetapi potensial untuk dapat dicantumkan dalam 25 grup papan atas yang dikendalikan taipan.

Dari daftar tersebut kemudian disusunlah grup kelapa sawit, yakni terpilih sebanyak 25 grup terbesar yang dikendalikan oleh taipan, berdasarkan *landbank* kelapa sawit yang dikuasai oleh mereka di Indonesia.

4.2 Analisis taipan dan grup

Semua informasi grup yang dikendalikan taipan dikumpulkan dari laporan tahunan dan situs web perusahaan, informasi dari daftar perusahaan, laporan media dan kajian sebelumnya tentang kegiatan yang berbeda dari kelompok usaha, struktur kepemilikan dan latar belakang taipan. Dalam setiap bab yang memuat berbagai grup usaha, informasi yang dikumpulkan kemudian diringkas dalam bagian pendek menyangkut kegiatan grup usaha dan taipan. Struktur kepemilikan digambarkan dalam bentuk grafik, yang menunjukkan berbagai perusahaan pengaman (*asing*) yang digunakan taipan untuk mengendalikan kegiatan kelapa sawit dari grup usaha tersebut.

4.3 Analisis anak perusahaan perkebunan dan *landbank*

Semua informasi grup perusahaan yang dikendalikan taipan dikumpulkan dari laporan tahunan dan situs web perusahaan serta dari laporan RSPO dan daftar izin konsesi di tingkat provinsi tentang *landbank* yang sudah diolah dan yang belum diolah oleh grup tersebut. Informasi ini sejauh mungkin dibedakan menurut provinsi dan menurut anak perusahaan perkebunan.

4.4 Analisis pembiayaan

Informasi tentang hubungan pembiayaan antara kegiatan kelapa sawit dari grup yang dikendalikan taipan dengan bank-bank Indonesia dan internasional selama lima tahun terakhir dihimpun dari laporan tahunan dan publikasi lainnya dari perusahaan, media (keuangan) dan basis data keuangan (Bloomberg, Thomson One). Semua pinjaman dan kredit yang diberikan oleh masing-masing bank selama lima tahun terakhir juga dirangkum dalam tabel terpisah untuk masing-masing kelompok yang dikendalikan taipan, yang juga menggambarkan jumlah dijamin oleh masing-masing bank atas pengeluaran saham dan obligasi.

4.5 Rangkuman dan dampak kebijakan

Semua data yang dihimpun dalam berbagai Bab untuk masing-masing grup yang dikendalikan taipan dirangkum dan kecenderungan dianalisis dalam rangkuman pada bagian awal laporan ini. Analisis ini digambarkan dengan sejumlah grafik dan diikuti dengan analisis singkat dampak kebijakan.

5. Pemilihan Grup Bisnis Kelapa Sawit Milik Taipan

Untuk kajian ini, 25 grup bisnis terbesar yang paling aktif di sektor kelapa sawit di Indonesia dipilih. Sebagai gambaran atas data kunci dari ke-25 grup bisnis dan perusahaan induk kelapa sawitnya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pemilihan atas grup kelapa sawit yang dikendalikan para taipan

NO	Grup Bisnis	Perusahaan Induk Kelapa Sawit					Produksi CPO (thd tonnes)
		Nama	Bursa Saham	Kapitalisasi Pasar (Juta USD)	Pemasukan 2013 (Juta USD)		
1	Wilmar Group	Wilmar International	Singapura	16,394.00	44,085.00	1,848	
2	Sinar Mas Group	Golden Agri-Resources	Singapura	5,859.40	6,585.00	2,241	
3	IOI Group	IOI Corporation	Kuala Lumpur	10,415.00	4,277.00	708	
4	Raja Garuda Mas Group	Asian Agri	Private	na	4,200.00	na	
5	Batu Kawan Group	Kuala Lumpur Kepong	Kuala Lumpur	8,041.10	2,916.00	3,609	
6	Salim Group	Indofood Agri Resources	Singapura	1,146.00	1,282.00	810	
7	Jardine Matheson Group	Astra Agro Lestari	Jakarta	3,704.00	1,233.00	1,539	
8	Musim Mas Group	Musim Mas	Private	na	670	619	
9	Surya Dumai Group	First Resources	Singapura	3,094.00	626.5	589	
10	Genting Group	Genting Plantations	Kuala Lumpur	2,754.70	439.7	328	
11	Damex Agro Group	Damex Agro	Private	na	420	432	
12	Harita Group	Bumitama Agri	Singapura	1,655.00	392	523	

Nr	Grup Bisnis	Perusahaan Induk Kelapa Sawit					Produksi CPO (thd tonnes)
		Nama	Bursa Saham	Kapitalisasi Pasar (Juta USD)	Pemasukan 2013 (Juta USD)		
13	Tiga Pilar Sejahtera Group	Tiga Pilar Sejahtera Food	Jakarta	557	391.6	27	
14	DSN Group	Dharma Satya Nusantara	Jakarta	358	370.9	336	
15	Sungai Budi Group	Tunas Baru Lampung	Jakarta	257.9	304.4	1.400	
16	Kencana Agri Group	Kencana Agri	Singapura	225.2	284.9	114	
17	Triputra Group	Triputra Agro Persada	Private	na	264	281	
18	Sampoerna Agro Group	Sampoerna Agro	Jakarta	364.5	247.2	271	
19	Anglo-Eastern Group	Anglo-Eastern Plantations	London	481.7	201.9	263	
20	Bakrie Group	Bakrie Sumatera Plantations	Jakarta	57.2	200.4	197	
21	Tanjung Lingga Group	Sawit Sumbermas Sarana	Jakarta	1,002.10	189.4	231	
22	Austindo Group	Austindo Nusantara Jaya	Jakarta	417.5	138.4	159	
23	BW Plantation Group	BW Plantation	Jakarta	479.5	110.4	141	
24	Provident Agro Group	Provident Agro	Jakarta	293.3	69	81	
25	Gozco Group	Gozco Plantations	Jakarta	50.0	41.3	49	

Dari ke-25 induk perusahaan sawit yang tercantum dalam Tabel 1, kebanyakan (21 perusahaan) telah terdaftar di bursa saham: 11 di Jakarta, 6 di Singapore, 3 di Kuala Lumpur dan 1 di London. Hanya 4 perusahaan yang dimiliki secara 'pribadi', yang salah satunya, yaitu Triputra Agro Persada berencana untuk segera mendaftar di bursa saham.

6. Para Taipan Dibalik Grup Bisnis Kelapa Sawit

Meskipun kebanyakan perusahaan (21 dari 25) yang termasuk dalam Tabel 1 telah terdaftar di bursa saham, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini benar-benar milik publik - dalam arti bahwa kepemilikan mereka tersebar di sejumlah besar investor swasta dan kelembagaan. Analisis struktur kepemilikan perusahaan induk kelapa sawit dalam kajian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dikendalikan oleh taipan dan keluarga mereka – bisa satu atau beberapa orang per perusahaan.

Taipan tersebut belum tentu memiliki saham mayoritas, tetapi mereka selalu memiliki saham terbesar yang memberikan mereka kemampuan untuk mengendalikan manajemen dan strategi perusahaan. Dalam banyak kasus kepemilikan saham ini dikelola melalui perusahaan induk di Negara yang ramah pajak.

Tabel 2 memberikan gambaran tentang para taipan yang diidentifikasi mengontrol 25 grup bisnis kelapa sawit yang diteliti dalam laporan ini. Negara asal masing-masing taipan diindikasikan, serta kekayaan bersihnya diperkirakan, sejauh yang baru-baru ini dilakukan oleh majalah Forbes Amerika dan surat kabar Indonesia The Jakarta Globe. Perkiraan kekayaan ini didasarkan pada semua kegiatan bisnis yang dikontrol oleh para taipan, tidak hanya berasal dari bisnis kelapa sawit saja.





Gambar 2 Taipan yang mengendalikan 25 grup bisnis kelapa sawit

No	Grup	Taipan	Negara Asal	Kekayaan bersih taipan pd tahun 2013 (juta USD)	
				Jakarta Globe	Forbes
1	Anglo-Eastern Group	Lim Siew Kim	Malaysia		
2	Austindo Group	George Santosa Tahija	Indonesia	385	
3	Bakrie Group	Aburizal Bakrie	Indonesia	2,450	
4	Batu Kawan Group	Lee Oi Hian & Lee Hau Hian	Malaysia		1,000
5	BW Plantation Group	Budiono Widodo	Indonesia		
6	Darmex Agro Group	Surya Darmadi	Indonesia	1,400	
7	DSN Group	Theodore Rachmat	Indonesia	2,000	1,900
		Benny Subianto	Indonesia	995	790
8	Genting Group	Lim Kok Thay	Malaysia		6,500
9	Gozco Group	Tjandra Mindhartia Gozali	Indonesia	93	
10	Harita Group	Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	Indonesia	990	940
11	IOI Group	Lee Shin Cheng	Malaysia		4,500
12	Jardine Matheson Group	Henry Keswick	Scotland		4,000
13	Kencana Agri Group	Henry Maknawi	Indonesia		
14	Musim Mas Group	Bachtiar Karim	Indonesia	575	2,000

No	Grup	Taipan	Negara Asal	Kekayaan bersih taipan pd tahun 2013 (juta USD)	
				Jakarta Globe	Forbes
15	Provident Agro Group	Edwin Soeryadijaya	Indonesia	1,700	1,200
16	Raja Garuda Mas Group	Sandiaga Uno	Indonesia	900	460
17	Salim Group	Sukanto Tanoto	Indonesia	2,100	2,300
18	Sampoerna Group	Anthoni Salim	Indonesia	10,100	6,300
19	Sinar Mas Group	Putera Sampoerna	Indonesia	2,400	2,215
20	Sungai Budi Group	Eka Tjipta Widjaja	Indonesia	13,000	7,000
21	Surya Dumai Group	Widarto & Santoso Winata	Indonesia	205	
22	Tanjung Lingga Group	Martias & Ciliandita Fangjono	Indonesia	1,050	1,700
23	Tiga Pilar Sejahtera Group	Abdul Paeyid	Indonesia		
24	Triputra Group	Priyo Hadi Sutanto & Stefanus Joko Mogginta & Budhi Istanto	Indonesia		
		Theodore Rachmat	Indonesia	2,000	1,900
		Benny Subianto	Indonesia	995	790
25	Wilmar Group	Robert Knok	Malaysia		11,600
		Khoon Hong Knok	Malaysia		2,200
		Martua Siturus	Indonesia	3,700	1,800

Ketika kita menghitung perkerabatan sebagai satu keluarga, Tabel 2 mencantumkan ada 29 keluarga taipan yang mengendalikan 25 kelompok kelapa sawit. Diantara mereka hanya satu keluarga taipan yang dipimpin oleh seorang perempuan, Lim Siew Kim Anglo-Eastern Plantations. 28-keluarga taipan lainnya dikepalai oleh laki-laki, meskipun dalam beberapa kasus anggota keluarga perempuan dari keluarga taipan tersebut terlibat dalam pengelolaan grup bisnis.

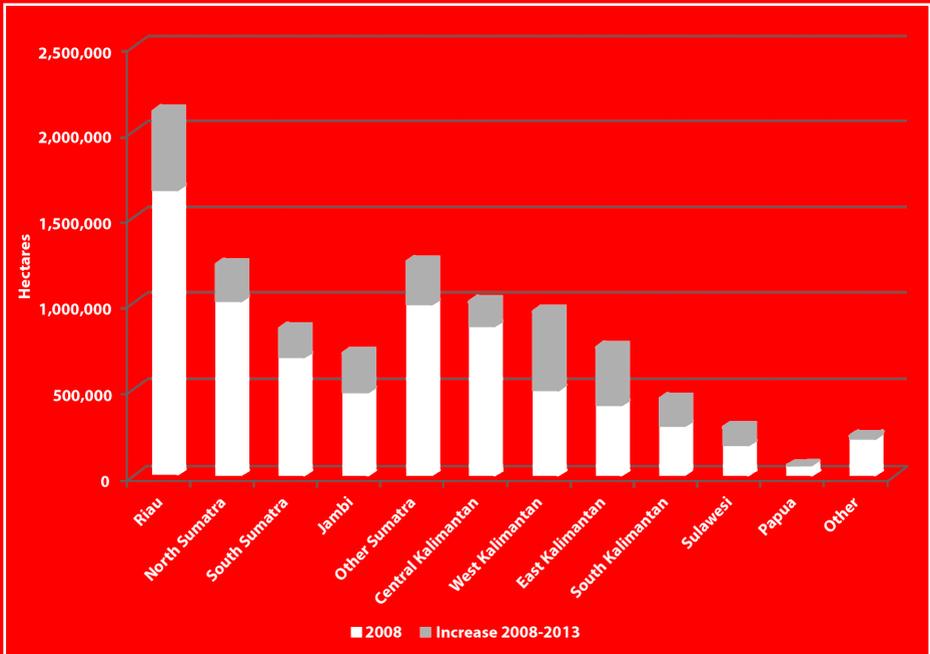
Total kekayaan dari 29 keluarga taipan dalam Tabel 2 diperkirakan mencapai USD 69.1 milyar secara rata-rata dari apa yang disajikan oleh Forbes dan Jakarta Globe dan dibuat perkiraan konservatif untuk taipan tersebut, yang tidak dilakukan oleh kedua sumber media tadi. Bahkan bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto Indonesia - US\$ 878 milyar pada tahun 2012 - jelaslah bahwa taipan-taipan ini mengontrol kekayaan yang sangat besar, apalagi bila dibandingkan dengan APBN 2014 yang sebesar 1.800 Trilyun, kekayaan bersih mereka setara dengan 45% APBN Indonesia; sesuai kurs yang berlaku Juli 2014.



7. Kendali Taipan atas *Landbank* Kelapa Sawit

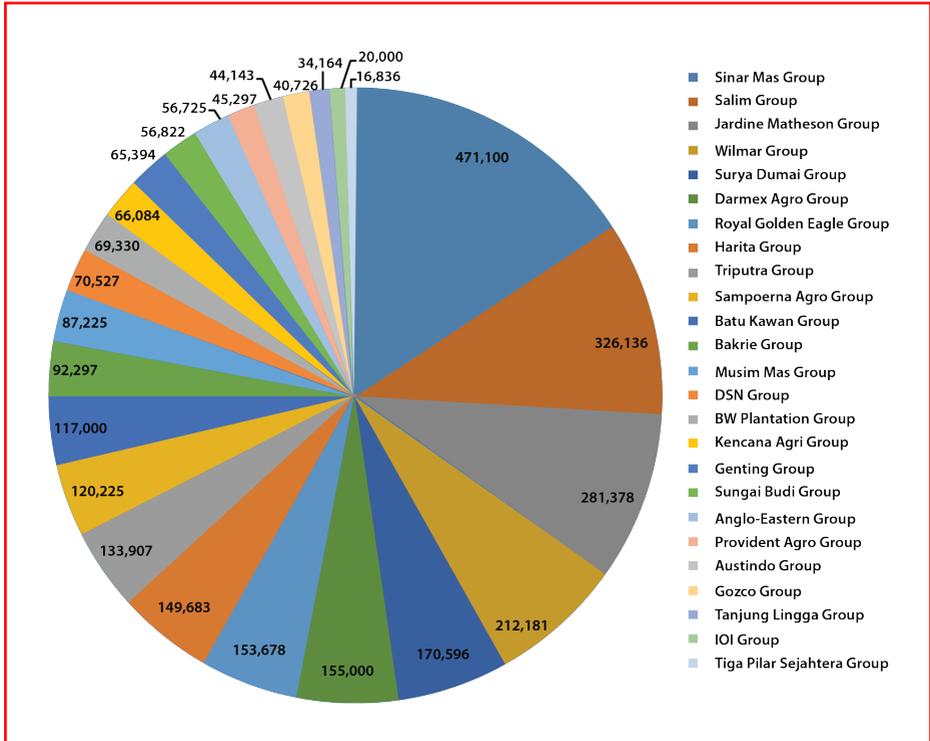
Dalam lima tahun terakhir, daerah yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat sebesar 35%, dari 7,4 juta ha pada tahun 2008 menjadi 10 juta ha pada tahun 2013. Ini setara dengan peningkatan sebesar 520.000 hektar per tahun. Artinya, area dengan luas mendekati Pulau Bali diubah menjadi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya.¹ Gambar 1 menunjukkan distribusi luasan perkebunan kelapa sawit di beberapa provinsi di Indonesia dan di provinsi mana pertumbuhan yang paling besar terjadi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Gambar 1 Pertumbuhan area kelapa sawit per provinsi, 2008-2013



Gambar 2 menunjukkan bahwa 25 kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh taipan yang dipelajari dalam kajian ini mengontrol 3,1 juta hektar kebun kelapa sawit berdasarkan statistik yang disajikan oleh grup bisnis kelapa sawit itu sendiri, antara lain dalam laporan tahunannya. Areal seluas ini sama dengan 31% dari total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia saat ini (10 juta hektar). Taipan paling penting - dalam hal luasan wilayah tanam - adalah Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group dan Surya Dumai Group.

Gambar 2 Area lahan yang telah ditanami kelapa sawit oleh 25 grup, akhir 2013 (ha)

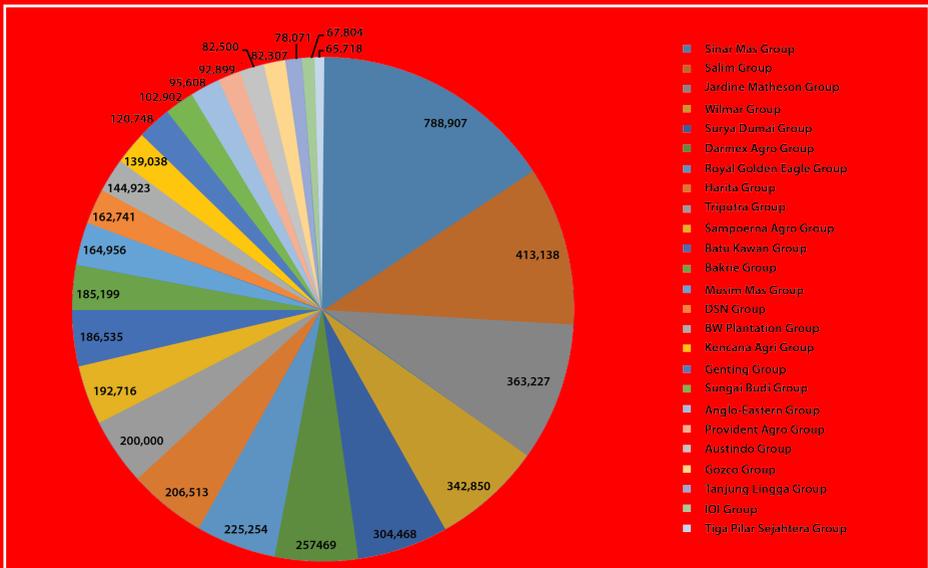


69% dari luas kebun yang sudah ditanami sawit yang tidak dikendalikan oleh 25 kelompok ini tersebar penguasaannya pada perusahaan lain yang aktif di sektor ini. Empat perusahaan yang dikendalikan negara aktif dalam sektor minyak sawit Indonesia - Perkebunan Nusantara (Indonesia), Sime Darby (Malaysia), PTT (Thailand) dan Felda Global Ventures (Malaysia) - secara bersama-sama mencapai 15%. Sekitar 100 taipan lain yang mengendalikan grup bisnis serta petani independen dan perusahaan milik keluarga kecil² mengisi persentase yang tersisa. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan dengan tepat siapa yang mengendalikan wilayah kelapa sawit yang sudah ditanam namun tidak dikendalikan oleh 25 taipan yang tercakup dalam laporan ini.

8. Kontrol Taipan atas Masa Depan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Untuk masa depan sektor kelapa sawit Indonesia yang bahkan menjadi lebih penting adalah kenyataan bahwa 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan masih memiliki 2,0 juta hektar lahan yang belum dikembangkan, selain 3,1 juta hektar yang telah ditanam. Gambar 3 menunjukkan total lahan Indonesia yang dikendalikan oleh masing-masing kelompok sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunan dan peta konsesi mereka.

Gambar 3 Total landbank kelapa sawit dari 25 grup bisnis, akhir 2013 (ha)

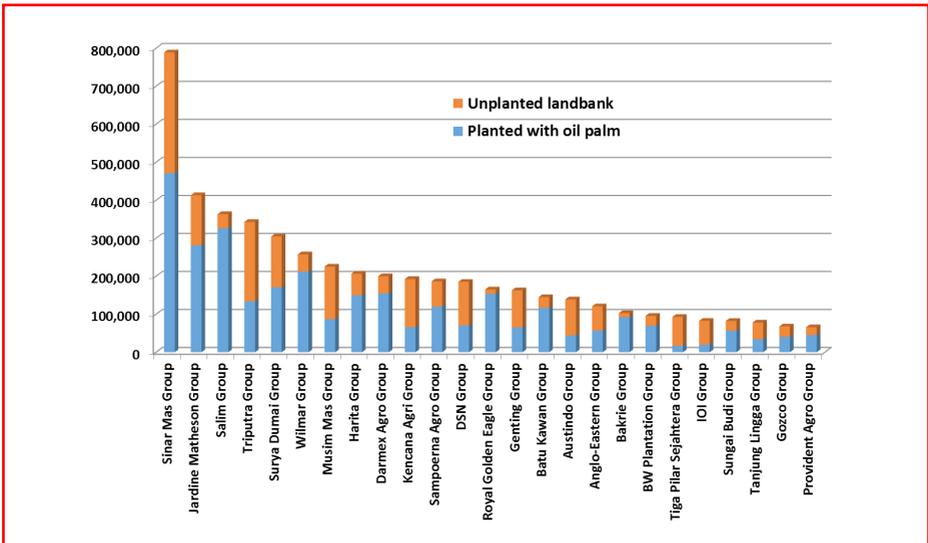


Total lahan Indonesia yang dikendalikan oleh 25-grup milik para taipan ini menjadi sebesar 5,1 juta hektar (yang telah dan yang belum ditanami) atau setara dengan 51% total area tanam perkebunan sawit saat ini.

Dari total *landbank* sebesar itu, 2,0 juta hektarnya belum ditanami. Ini berarti, 40% lahan yang dikuasai oleh 25 grup bisnis ini belum ditanami kelapa sawit.

Gambar 4 menunjukkan total lahan Indonesia yang dikendalikan oleh masing-masing grup, dengan membedakan lahan yang sudah ditanam dan yang belum ditanam. Grup bisnis terpenting dalam hal penguasaan lahan yang belum ditanami di Indonesia adalah Sinar Mas Group, Triputra Group, Musim Mas Group, Surya Dumai Group dan Jardine Matheson Group.

Gambar 4 *Landbank* yang sudah dan yang belum ditanam; milik 25 grup bisnis para taipan (ha)

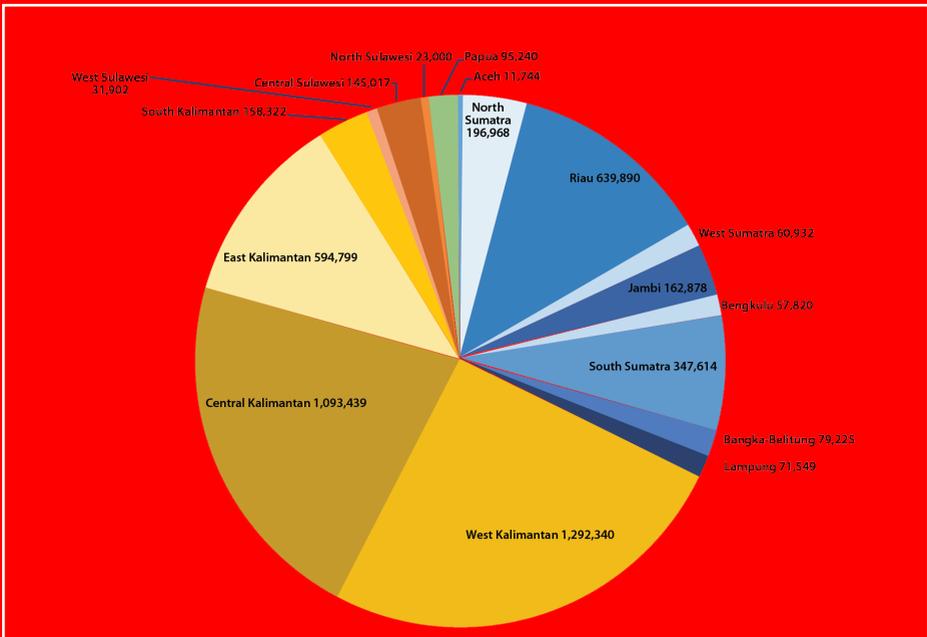


Jika 2,0 juta hektar lahan yang belum ditanami yang dikuasai oleh 25 grup bisnis para taipan ini dikembangkan di tahun-tahun mendatang, lahan yang ditanami kelapa sawit di Indonesia akan meningkat sebesar 20% menjadi 12,0 juta hektar, menciptakan masalah sosial dan lingkungan yang lebih rumit. Proporsi total luas kebun kelapa sawit yang dikendalikan oleh 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh para taipan ini akan meningkat dari 31% menjadi 43%.

9. Kontrol Taipan atas *Landbank* Kelapa Sawit Per Provinsi

Secara keseluruhan, 25 kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh taipan ini memiliki porsi yang cukup besar atas total *landbank* di Indonesia secara keseluruhan, kontrol mereka cukup bervariasi pada tingkat provinsi. Gambar 5 menunjukkan bagaimana *landbank* kelapa sawit dari 25 kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh taipan didistribusikan di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 62% *landbank* yang dikuasai oleh 25 grup bisnis yang dikuasai taipan ini terletak di Kalimantan, sementara 32% terletak di Sumatera, 4% di Sulawesi dan 2% di Papua. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Kalimantan Timur adalah provinsi dengan penguasaan *landbank* terbesar para taipan.

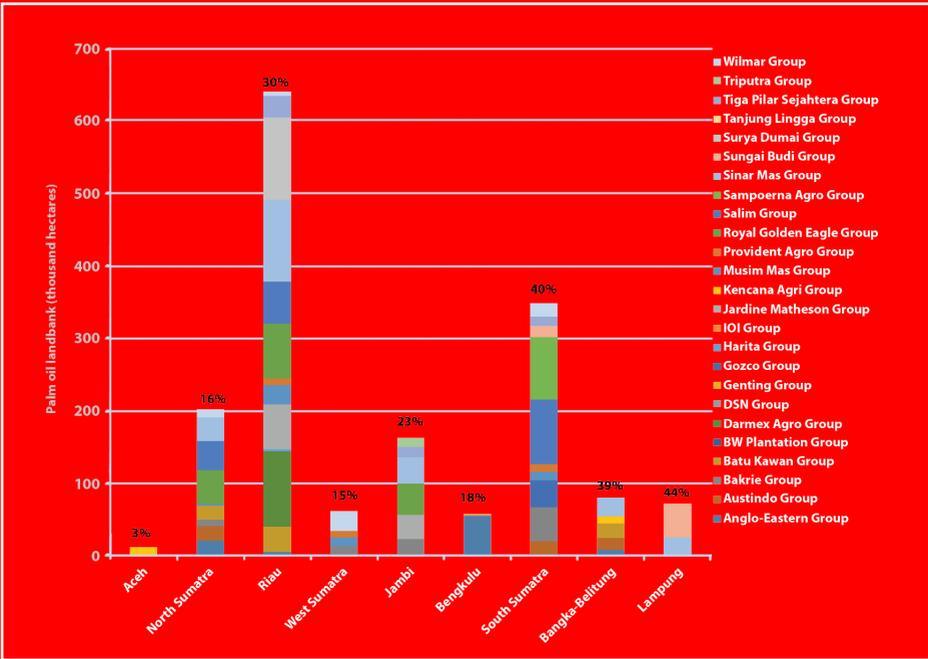
Gambar 5 *Landbank* kelapa sawit kontrol taipan per provinsi



Gambar 6 menunjukkan luasan lahan kebun kelapa sawit di provinsi-provinsi di Sumatera yang dikendalikan oleh 25 grup bisnis yang dikuasai oleh para taipan. Angka ini menunjukkan ukuran *landbank* milik perusahaan-perusahaan tersebut dalam hektar (yang sudah dan yang belum ditanami) dan membandingkan luasan lahan tersebut dengan daerah yang sudah ditanami kelapa sawit di tiap provinsi (dalam persentase). Saat total luasan lahan Indonesia yang menjadi *landbank* dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan ini sama dengan 51% dari total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia secara keseluruhan, persentase itu lebih rendah untuk semua provinsi di Sumatera. Persentase tertinggi dapat ditemukan di Lampung (44%), Sumatera Selatan (40%) dan Bangka-Belitung (39%). Persentase yang relatif rendah ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa industri kelapa sawit pertama kali dikembangkan di Sumatera, yang mungkin berarti bahwa sebagian besar dari *landbank* kelapa sawit di Sumatera berada di tangan grup bisnis yang dikendalikan oleh negara dan grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan yang lebih kecil dan pekebun mandiri.



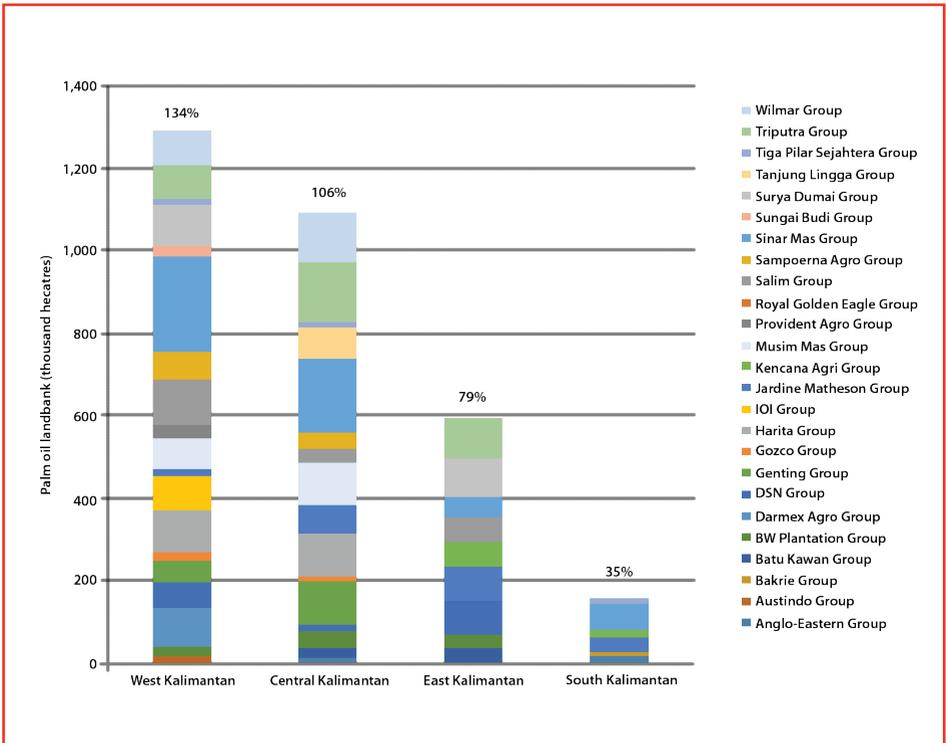
Gambar 6 Kontrol taipan atas *landbank* kelapa sawit di Sumatra



Di Kalimantan, dominasi 25 grup bisnis ini jauh lebih kuat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Di seluruh empat provinsi³, 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan mengontrol bagian yang sangat penting dari total *landbank* kelapa sawit. Angka ini menunjukkan luasan lahan (dalam hektar) yang dikuasai oleh grup bisnis ini (ditanam dan yang belum ditanami) dan membandingkannya dengan luasan tanam provinsi (dalam persentase). Karena lahan yang dikuasai oleh 25 grup bisnis ini termasuk juga konsesi lahan yang belum ditanami kelapa sawit, persentasenya bisa naik hingga mendekati angka 100%, seperti kasus Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara rata-rata, *landbank* kelapa sawit yang dikuasai oleh 25 grup bisnis yang dikontrol oleh taipan ini setara dengan 98% dari total luasan lahan yang telah ditanami kelapa sawit di Kalimantan. Dengan kata lain *landbank* yang dikuasai oleh taipan ini setara dengan total luasan lahan yang saat ini sudah ditanami kelapa sawit di Kalimantan.

Dari keseluruhan *landbank* mereka di Indonesia, 40%-nya belum ditanami. Persentase ini lebih tinggi untuk Kalimantan, kira-kira 50% dari *landbank* yang dikuasai taipan ini (dari total 3,1 juta hektar, lihat Gambar 4) belum ditanami. Oleh karenanya, mudah saja untuk memperkirakan, bahwa dengan menanami seluruh *landbank* mereka; 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh taipan tersebut akan meningkatkan areal tanam kelapa sawit di Kalimantan (3,2 juta hektar saat ini) sebesar 50% (1,6 juta hektar) di tahun-tahun mendatang. Konsekuensi sosial dan lingkungan dari ekspansi yang berlanjut ini bisa sangat besar.

Gambar 7 Kontrol taipan atas *landbank* kelapa sawit di Kalimantan



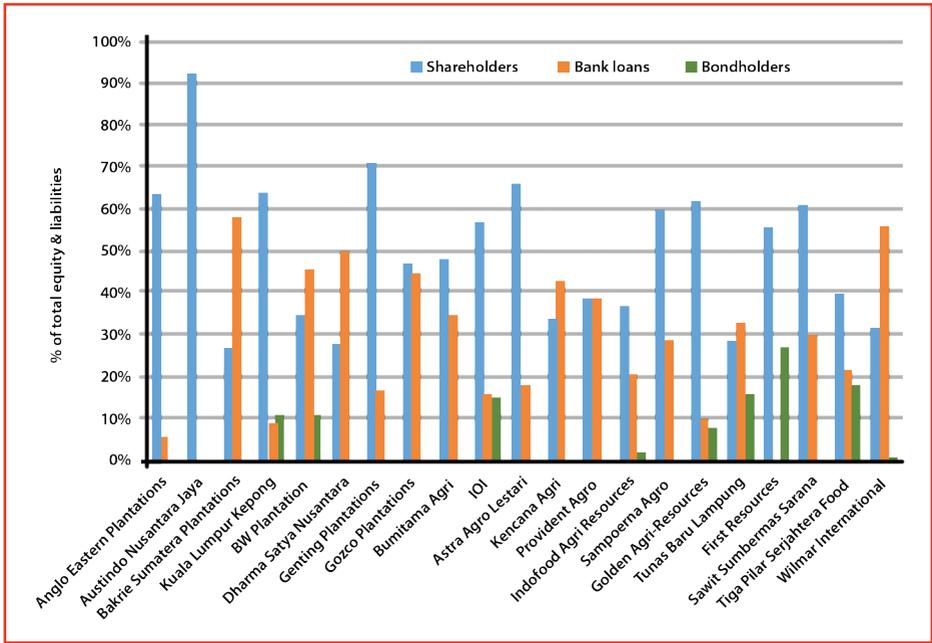
10. Pembiayaan Ekspansi Sawit Milik Taipan

Meskipun 25 grup bisnis yang dianalisis dalam laporan ini sepenuhnya dikendalikan oleh para taipan, mereka tidak hanya bergantung pada kekayaan para taipan untuk membiayai ekspansinya di masa-masa mendatang. Dari 25 induk perusahaan, 21-nya sudah terdaftar di pasar modal; yang artinya mereka sudah menarik dan - akan terus menarik - modal dengan melakukan emisi saham untuk investor institusi dan pribadi. Beberapa perusahaan juga mengeluarkan obligasi, terutama ke investor institusi. Semua perusahaan ini bisa menarik pinjaman bank.

Bank dan investor eksternal bisa terlibat dan membuat taipan bisa berinvestasi lebih besar untuk modal, yang kemudian mempercepat pertumbuhan grup bisnis mereka. Konsekuensinya, pertumbuhan ini menimbulkan aliran kas yang kuat yang kemudian kembali bisa digunakan oleh taipan ini untuk berinvestasi dan mengembangkan perusahaan mereka. Saat para taipan mengendalikan proses ekspansi sektor kelapa sawit, dana bank dan investor eksternal yang digelontorkan kepada mereka memungkinkan mereka untuk makin mempercepat laju ekspansinya.

Dalam rangka menaksir tingkat penggunaan dana dari pihak luar yang digunakan para taipan ini untuk berekspansi, kami menganalisis neraca perusahaan di akhir tahun 2013 dari 21 perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Untuk tiap perusahaan, kami menganalisis bagian mana dari modal dan utang mereka yang bisa dikaitkan dengan para pemegang sahamnya, pemegang surat obligasinya, dan pinjaman bank-nya; dan kemudian, bagian mana dari aktiva totalnya yang dibiayai oleh kelompok pendana yang ada. Analisis ini memberi indikasi akan pentingnya pendanaan eksternal untuk grup bisnis yang dikontrol oleh para taipan, meskipun angkanya terbatas pada satu masa tertentu saja dan tidak bisa memberikan gambaran secara jangka panjang. Hasilnya ditunjukkan dalam Gambar 8

Gambar 8 Penyanggah dana perusahaan induk kelapa sawit milik para taipan



Seperti ditunjukkan dalam Gambar 8, para pemegang saham adalah penyanggah dana yang paling penting bagi 15 perusahaan dari 21 yang sudah terdaftar di pasar modal; membiayai 27% hingga 92% dari total aktiva mereka. Penting untuk digarisbawahi bahwa sebagian dari uang pemegang saham ini bisa saja berasal dari taipan itu sendiri; dan bagian yang lainnya – jumlahnya berbeda-beda untuk tiap perusahaan – berasal dari pemegang saham eksternal (pribadi dan investor institusional).

Pemegang obligasi memegang peran yang lebih kecil untuk 9 perusahaan dari 25 yang dikaji. Yang paling signifikan adalah pemegang obligasi dari First Resources, yang mendanai 27% dari total aktivanya. Utang bank cukup penting untuk 19 perusahaan; bahkan untuk 6 di antaranya: Bakrie Sumatera Plantations, BW Plantation, Dharma Satya Nusantara, Kencana Agri, Tunas Baru Lampung and Wilmar International – utang bank menjadi sumber pendanaan terpenting untuk perusahaan mereka, mencapai 58% dari total aktivanya.

11. Bank-bank yang Membiayai Grup Bisnis Para Taipan

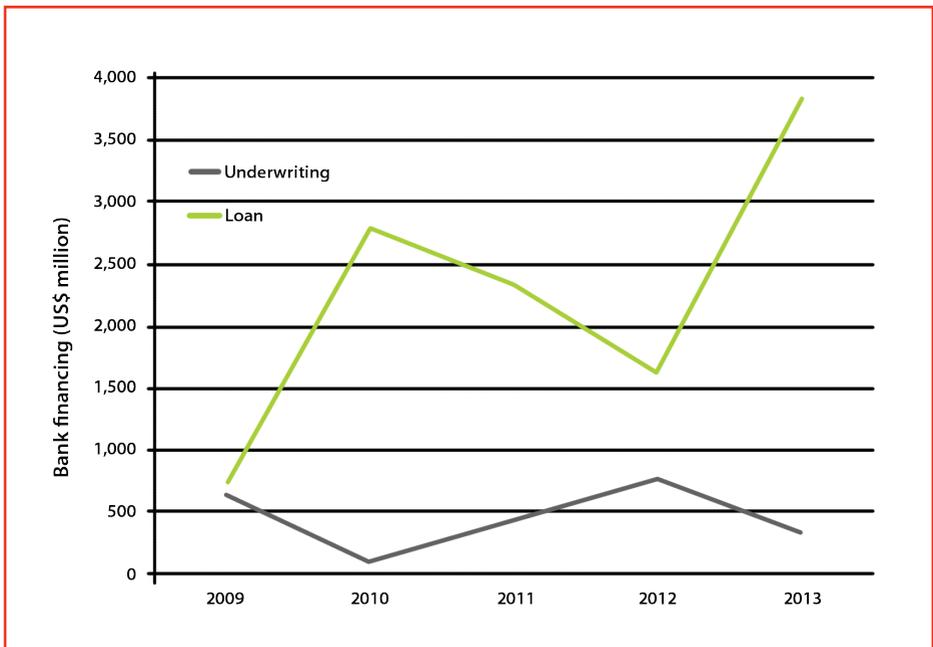
Sebagian besar kelompok kelapa sawit yang dikendalikan oleh taipan-taipan ini menarik pinjaman bank untuk mempermudah dan mempercepat proses ekspansi mereka. Selain itu, banyak dari mereka secara teratur menyewa bank investasi untuk membantu mereka menjual saham baru dan obligasi kepada investor untuk menarik modal baru bagi ekspansi. Bank-bank investasi ini kemudian menjamin ("*underwriter*") bahwa mereka akan mencari investor untuk volume tertentu saham dan obligasi dengan harga tertentu.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 3 dan Gambar 9, bank telah membantu 25 kelompok kelapa sawit milik para taipan untuk menarik jumlah modal yang cukup selama lima tahun terakhir, melalui pemenuhan utang secara mandiri dan dengan penjaminan saham dan obligasi yang dijual kepada investor oleh perusahaan. Untuk periode 2009 sampai 2013, kajian ini mengidentifikasi pinjaman dengan nilai total USD 17,8 milyar diberikan oleh bank kepada 25 kelompok kelapa sawit milik para taipan yang dipelajari dalam laporan ini. Pada periode yang sama, bank investasi telah menjadi penjamin (*underwriter*) penerbitan saham dan obligasi dari 25 grup bisnis kelapa sawit dengan nilai total USD 10,6 miliar. Ini berarti bahwa bank telah membantu perusahaan untuk menarik dana dalam jumlah tersebut dari investor.

Tabel 3 Pembiayaan bank untuk 25 grup milik taipan, 2009-2013

Tahun	<i>Underwriting</i> (juta USD)	Utang (juta USD)
2009	3,807	936
2010	788	4,063
2011	903	3,902
2012	4,464	3,820
2013	631	5,101
Total	10,592	17,822

Gambar 9 Bank yang membiayai 25 grup bisnis milik para taipan 2009-2013

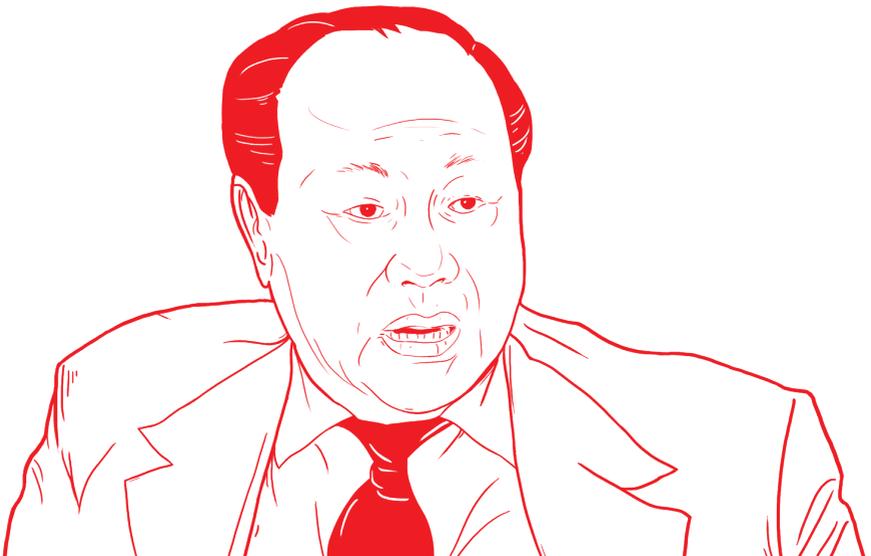
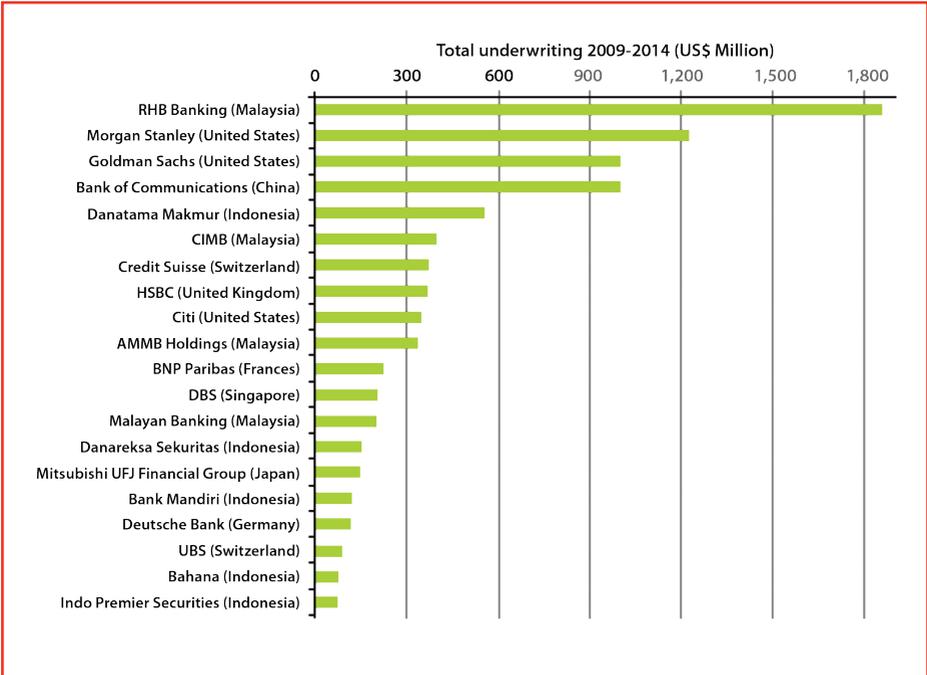


Gambar 10 Bank yang menyediakan pinjaman untuk grup bisnis milik taipan, 2009-2014



Gambar 11 memberikan gambaran bank yang menjadi *underwriter* bagi 25 grup kelapa sawit dalam lima tahun terakhir, termasuk jumlah total yang di-*underwrite* per bank. Bank-bank pelaku *underwriting* yang paling penting adalah RHB (Malaysia), Morgan Stanley (Amerika Serikat) dan Goldman Sachs (Amerika Serikat).

Gambar 11 Bank-bank *underwriter* emisi saham dan obligasi grup bisnis para taipan, 2009-2014



12. Konsekuensi Kebijakan

Kajian ini menunjukkan bahwa dari hanya 25 grup bisnis kelapa sawit milik taipan telah mengendalikan *landbank* kelapa sawit 5,1 juta hektar, dimana 3,1 juta hektar telah ditanami saat ini (31% dari total area yang ditanami kelapa sawit di Indonesia). Jika grup-grup bisnis ini kemudian mengembangkan 2,0 juta hektar lahan mereka di tahun-tahun mendatang, areal kelapa sawit Indonesia akan tumbuh sebesar 20% dan total area yang ditanami milik 25 grup bisnis ini akan meningkat menjadi 43% secara total

Konsentrasi kuasa dan *landbank* mereka bahkan lebih kuat di beberapa provinsi: lahan yang sudah dan belum ditanami dari 25 grup bisnis milik taipan di Kalimantan setara dengan 98% dari luas saat ini ditanami kelapa sawit di Kalimantan (3,2 juta hektar). Jika lahan mereka di Kalimantan akan sepenuhnya ditanam di tahun-tahun mendatang, luas areal tanam kelapa sawit di Kalimantan akan meningkat sebesar 50%.

Kajian juga menunjukkan, 25 grup bisnis kelapa sawit ini mendapat suntikan pendanaan secara total sebesar USD 13,549 juta dari *underwriting* dan hutang selama periode 2009 - 2013. Dalam periode ini, tepatnya 26 Mei 2010, Pemerintah Indonesia meneken *Letter of Intent* (LoI) dengan Kerajaan Norwegia tentang kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi kehutanan. Seiring dengan LoI ini, Indonesia akan mendapatkan hibah sebesar USD 1 miliar untuk melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kajian ini menunjukkan bahwa bisnis telah secara nyata mendapatkan kemudahan mendapat pendanaan dari bank maupun lembaga keuangan non-bank, terutama dari pasar global, yang nilainya sangat besar. Pada saat Pemerintah bersungguh-sungguh dengan komitmennya mencapai tingkat emisi karbon yang lebih rendah melalui berkurangnya laju deforestasi dan degradasi hutan; maka perlu ada integralisasi kebijakan dari sisi yang paling hulu yaitu sisi pendanaan.

Ketika 21 dari 25 grup bisnis kelapa sawit yang dianalisis dalam kajian ini telah terdaftar perkebunan perusahaan induk mereka di bursa saham, kajian ini

menunjukkan bahwa ke-25 perusahaan ini dikendalikan oleh satu atau lebih taipan, 29 taipan keluarga secara total, dengan kekayaan pribadi gabungan sebesar USD 69,1 juta, mengendalikan 25 kelompok kelapa sawit. Seringkali ‘kontrol’ ini dilakukan melalui perusahaan induk di negara-negara ramah pajak (tax havens); para taipan biasanya memiliki saham terbesar di perusahaan induk yang terdaftar di bursa saham yang memberi mereka kuasa untuk mengendalikan manajemen dan strategi perusahaan tersebut. Akibatnya, sekelompok kecil konglomerat menjadi penentu bagi pengembangan sektor kelapa sawit Indonesia dan oleh karena itu mereka juga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah, konflik sosial, eksploitasi pekerja dan petani kecil yang berhubungan dengan laju ekspansi sektor ini.



Konsentrasi kuasa korporasi di sektor minyak sawit Indonesia di tangan beberapa konglomerat, memerlukan tindakan semua pihak yang terlibat dan berusaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif secara sosial dari sektor ini:

- Pemerintah Indonesia mesti mengakui bahwa saat hutan mengalami kerusakan terus menerus dan masyarakat kehilangan tanah mereka sebagai konsekuensi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit, para taipan justru dengan nyaman memarkir kekayaan mereka untuk tumbuh di negara-negara ramah pajak dan terus memperkuat cengkeraman mereka di sektor ini tanpa transparansi yang memadai dan kontrol publik. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013, yang membatasi total landbank untuk produksi kelapa sawit 100.000 hektar per perusahaan grup, gagal untuk membatasi penguasaan korporasi atas lahan di Indonesia. Hal ini karena perusahaan terbuka (terdaftar di bursa saham) dikecualikan dari peraturan⁴ ini, sementara kajian ini menunjukkan bahwa 21 dari 25 grup bisnis yang dikendalikan oleh para taipan ini telah beroperasi melalui perusahaan induk yang terdaftar di bursa saham.

Tidak ada argumen yang jelas mengapa perusahaan terbuka dikecualikan dari peraturan ini. Sebagai langkah pertama untuk mengembalikan kontrol pemerintah atas sektor ini beserta seluruh konsekuensi sosial dan lingkungan dalam jalur pembangunannya, peraturan pemerintah ini perlu menyertakan perusahaan-perusahaan terbuka juga. Kedua, kajian lebih lanjut diperlukan ke dalam ikatan yang kuat dari para taipan dengan partai-partai politik dan pemerintah pada tingkat yang berbeda, karena pertumbuhan bisnis dan kuasa mereka juga bisa dikaitkan dengan isu-isu korupsi, penggelapan pajak, transparansi, penghormatan hak-hak masyarakat dan isu akuntabilitas.

- Lembaga keuangan dalam dan luar negeri juga perlu mengakui bahwa proses konsentrasi bank tanah dan kekuasaan di sektor kelapa sawit di tangan sekelompok kecil elite selanjutnya difasilitasi oleh dana dari bank dan investor eksternal menawarkan taipan roda gila untuk mempercepat

ekspansi mereka. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013, bank-bank memberikan pinjaman dengan nilai total USD 11,3 milyar untuk 25 grup bisnis kelapa sawit milik para taipan ini serta telah menjadi underwriter untuk emisi saham dan obligasi grup bisnis tersebut dengan nilai total USD 2,3 miliar. Bank-bank paling penting yang menyediakan pinjaman adalah HSBC (United Kingdom), OCBC (Singapore) dan CIMB (Malaysia), sedangkan bank underwriting yang paling penting adalah RHB (Malaysia), Morgan Stanley (Amerika Serikat) dan Goldman Sachs (Amerika Serikat).

Karena peran penting mereka dalam ekspansi bisnis grup bisnis milik para taipan ini, lembaga keuangan dalam dan luar negeri karena itu harus memperkuat kebijakan risiko sosial dan lingkungan mereka dan meningkatkan penilaian risiko dan mekanisme akuntabilitasnya. Lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan menghindari kerelaan untuk memfasilitasi pertumbuhan lebih lanjut dari pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah, konflik sosial, eksploitasi pekerja dan petani kecil di sektor ini.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator dari semua lembaga keuangan di Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan lembaga keuangan mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang baik dan mengadopsi kebijakan keberlanjutan di dalam lembaganya. Sekarang OJK sedang menyusun arsitektur OJK, oleh karenanya, menjadi strategis untuk mendukung OJK mengembangkan pedoman uji tuntas bagi kredit korporasi untuk sektor ekonomi tertentu; untuk mengadakan pertukaran informasi secara teratur dengan masyarakat sipil Indonesia; untuk memperkuat pelaporan bank; dan untuk mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang baik bagi lembaga keuangan.

- Para pihak perlu mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Kaji ulang pemanfaatan lahan yang sangat besar tersebut untuk kepentingan ketahanan pangan, menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dibandingkan terus berorientasi pada ekspor, kemudian konservasi hutan dan usaha pariwisata serta mengembangkan tanaman komoditas lain yang bisa mengintegrasikan hulu ke hilir. Perlu penciptaan relevansi antara peningkatan produktifitas kebun, pengelolaan pekebun dan perijinan; dengan memberikan insentif pada perusahaan yang mampu meningkatkan produktifitasnya dan yang mampu bersama-sama pekebunnya melakukan pengembangan kebun secara inklusif; dan memberikan disinsentif berupa penangguhan pemberian ijin usaha bagi perusahaan yang tidak terbukti mampu meningkatkan produktifitas kebun atau tidak melakukan upaya pengembangan kebun yang inklusif dengan para pekebunnya.
- Pemerintah perlu menganalisis kaitan antara PDB, angka serapan kerja dan Indeks GINI. Dalam dekade terakhir, Indeks GINI mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 0.31 ke 0.41. Perlu dikaji faktor apa yang menjadi penyebab terbesar kesenjangan ini. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia mengharuskan Negara untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan bersamaan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
- Industri kelapa sawit memerlukan investasi yang lebih integral, meliputi investasi ke sektor hilir, tidak hanya penyulingan minyak tetapi juga ke sektor hilir lain, seperti pengolahan bahan makanan dan produk-produk oleokimia.

(Catatan Kaki)

- 1 Kementerian Pertanian, “Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia, 2009 - 2013”, (<http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/IP%20ASEM%20BUN%202013/Areal-KelapaSawit.pdf>), diakses pada bulan Juni 2014.
- 2 Angka yang tersedia menurut data terakhir untuk luasan kebun petani kecil kelapa sawit adalah adalah 3,3 juta hektar pada tahun 2010 (DirjenBun, “Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut Pengusahaan”). Namun angka ini memasukkan juga program inti-plasma dari grup bisnis milik para taipan; luasan area yang dikendalikan oleh petani swadaya menurut beberapa anggapan jauh lebih rendah tetapi tidak ada angka setepat-tepatnya yang dapat diketahui
- 3 Mengikuti data dari Deptan atas landbank, kami memperlakukan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih sebagai satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur.
- 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Nomor 98/2013, 30 September 2013, Pasal 17 (3): *“Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.”*

Tentang TuK INDONESIA

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) adalah NGO yang berbasis di Jakarta dan bekerja pada isu lingkungan, sumber daya alam dan dampak pembangunan terhadap hak asasi manusia. TuK INDONESIA melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia, untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan integritas manusia. Misinya adalah untuk memberdayakan masyarakat sipil dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan Indonesia; untuk mempromosikan pengakuan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dan pengelolaan dan serta untuk mengadvokasi pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

TuK INDONESIA

Jl. Kecapi Raya No. 1 Jagakarsa
Jakarta Selatan, 12620 - Indonesia
Tlp. +62 21 788 90 257
Fax. +62 21 788 90 258
www.tuk.or.id



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl. Kecapi Raya No. 1 Jagakarsa
Jakarta Selatan, 12620 - Indonesia

Tlp. +62 21 788 90 257

Fax. +62 21 788 90 258

www.tuk.or.id